



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dan Kendala yang Dihadapi Pelaku Usaha (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Malang)

Preparation of Financial Reports Based on Micro, Small, and Medium Enterprises Financial Accounting Standards (SAK EMKM) and Obstacles Faced by Business Actors (Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises in Malang City)

Aditya Rizki¹, Suprapti²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

***Corresponding Author: E-mail:** rizkiaditya87@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

Kata Kunci:

Kendala UMKM;
Laporan Keuangan;
SAK EMKM;
UMKM.

Keywords:

Financial Statement;
MSME;
MSME Obstacles;
SAK EMKM.

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10081](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10081)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan, menganalisis kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap responden di lima kecamatan di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh UMKM responden tidak melakukan pencatatan maupun penyusunan laporan keuangan formal, baik berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, maupun catatan atas laporan keuangan. Praktik pengelolaan keuangan masih bersifat sederhana, tidak sistematis, dan hanya mengandalkan ingatan atau perkiraan lisan tanpa dukungan dokumen tertulis. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi keuangan dan pengetahuan akuntansi akibat latar belakang pendidikan, serta adanya persepsi bahwa laporan keuangan adalah hal yang rumit dan kurang penting dibandingkan aktivitas operasional harian. Peneliti melakukan rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan data wawancara untuk menunjukkan bahwa SAK EMKM sebenarnya dapat diterapkan secara sederhana jika pelaku usaha mendapatkan pendampingan dan pelatihan yang tepat.

ABSTRACT

This research aims to determine the procedures for preparing financial statements, analyze their compliance with the Financial Accounting

Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM), and identify the obstacles faced by MSME actors in Malang City. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, documentation, and in-depth interviews with respondents in five districts in Malang City. The research results show that all respondent MSMEs do not carry out recording or preparation of formal financial statements, whether in the form of profit and loss statements, statements of financial position, or notes to financial statements. Financial management practices are still simple, unsystematic, and only rely on memory or oral estimates without the support of written documents. The main obstacles found include low financial literacy and accounting knowledge due to educational background, as well as the perception that financial statements are complicated and less important than daily operational activities. The researcher reconstructed the financial statements based on interview data to show that SAK EMKM can actually be applied simply if business actors receive proper assistance and training.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2025, sektor UMKM menyumbang sekitar 62,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Sementara itu, Badan Pusat Statistik pada Februari 2025 mencatat bahwa 59,40% dari total penduduk bekerja berada di sektor informal yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang tersebar di berbagai daerah, menunjukkan peran besar dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berpengaruh pada tingkat makro tetapi juga menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun, di balik kontribusi tersebut, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum sesuai standar.

Menurut Hapsari (2020), sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih menggunakan pencatatan keuangan yang sangat sederhana, bahkan ada yang belum memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan tidak dapat menggambarkan kondisi usaha secara akurat. Akibatnya, pelaku UMKM sering kesulitan dalam menilai kinerja keuangan serta mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menandakan adanya kesenjangan literasi akuntansi yang cukup besar di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Permasalahan ini dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha karena pengelolaan keuangan yang tidak tertib akan menyulitkan proses evaluasi usaha. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman akuntansi yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka.

Sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2016 memperkenalkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini disusun untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara sederhana, terstruktur, dan sesuai karakteristik usahanya (IAI, 2016). SAK EMKM berfokus pada tiga komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan standar ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, andal, serta bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal. Melalui

penerapan SAK EMKM, UMKM juga diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas usaha mereka di mata lembaga keuangan dan investor. Dengan demikian, SAK EMKM menjadi langkah strategis dalam meningkatkan literasi akuntansi dan tata kelola keuangan bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Meski demikian, implementasi SAK EMKM dalam praktiknya masih menemui berbagai kendala. Susilowati (2021) menegaskan bahwa rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya laporan keuangan menjadi faktor utama hambatan penerapan standar ini. Banyak pelaku usaha lebih memprioritaskan kegiatan operasional dibandingkan pencatatan keuangan yang dianggap tidak mendesak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pendampingan dari pemerintah membuat pelaku UMKM sulit menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Kurangnya literasi akuntansi dan keterbatasan biaya untuk menyewa tenaga profesional juga memperburuk situasi tersebut. Akibatnya, sebagian besar UMKM tetap menggunakan pencatatan sederhana meskipun hal ini berpotensi menghambat pengembangan usaha.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas penerapan SAK EMKM pada berbagai wilayah di Indonesia dengan temuan yang beragam. Lestari (2022) menemukan bahwa sebagian besar UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai standar karena kendala pemahaman dan pencatatan manual. Kalsum (2022) juga menyebutkan bahwa pelaku UMKM masih mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akurat. Guindrayanti (2024) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SI APIK dapat membantu penyusunan laporan berbasis SAK EMKM meski catatan atas laporan masih belum lengkap. Sementara itu, Anggraeni (2023) dan Ayuningtyas (2023) menyoroti bahwa meskipun ada upaya penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, pemahaman pelaku usaha terhadap isi dan struktur laporan masih rendah. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM masih memerlukan dukungan berupa pelatihan dan pendampingan agar dapat diterapkan secara efektif di tingkat UMKM.

Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika ekonomi berbasis UMKM yang cukup tinggi dengan sektor perdagangan, kuliner, dan jasa sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, praktik pencatatan keuangan di kalangan pelaku usaha masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan ketentuan akuntansi formal. Sebagian besar pelaku UMKM hanya mencatat arus kas masuk dan keluar tanpa melakukan pengelolaan laporan secara terstruktur. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan menilai kinerja usaha serta memenuhi persyaratan administrasi dalam pengajuan pembiayaan. Wilayah ini menjadi representasi penting untuk mengkaji efektivitas penerapan SAK EMKM di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memberikan gambaran nyata mengenai kesenjangan penerapan standar akuntansi di sektor UMKM.

Kesenjangan antara adanya standar akuntansi yang telah diterbitkan dengan kenyataan di lapangan menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Sebagian penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek teknis penyusunan laporan keuangan, sementara faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan belum banyak dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis secara menyeluruh bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM diterapkan di kalangan pelaku UMKM serta kendala yang mereka hadapi. Fokus penelitian diarahkan pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Malang dengan tujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, menganalisis tingkat kesesuaian laporan yang dibuat, dan mengidentifikasi kendala utama dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi akuntansi serta menjadi dasar kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan UMKM di Kota Malang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Variabel penelitian mencakup penyusunan laporan keuangan, analisis kesesuaian laporan dengan SAK EMKM, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam penerapannya (IAI, 2016). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM, baik dalam bentuk data primer seperti dokumen transaksi dan laporan keuangan, maupun data sekunder berupa literatur pendukung. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan wawancara terstruktur untuk menggali pemahaman pelaku usaha mengenai praktik akuntansi dan kendala pelaporan (Sanjaya, 2016). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu analisis proses penyusunan laporan keuangan, analisis kesesuaian laporan dengan standar, serta analisis kendala yang dihadapi pelaku UMKM (Kurniawan, 2017). Hasil analisis digunakan untuk menilai tingkat penerapan SAK EMKM, mengidentifikasi hambatan utama, dan merumuskan solusi peningkatan literasi akuntansi bagi UMKM. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang akurat dan bermanfaat bagi pengembangan tata kelola keuangan UMKM di Kota Malang.

HASIL

Gambaran Umum UMKM di Kota Malang

UMKM di Kota Malang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan total 20.517 unit usaha yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru (BPS Kota Malang, 2024). Persebaran ini menunjukkan adanya perbedaan potensi ekonomi dan karakteristik usaha di tiap wilayah, dengan sektor perdagangan menjadi yang paling dominan disusul oleh sektor jasa dan manufaktur. Dari total tersebut, UMKM kuliner menempati porsi terbesar yakni sebanyak 11.929 unit, menegaskan bahwa sektor ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat Kota Malang. Sebagian besar UMKM kuliner, seperti warung makan, dikelola secara mandiri tanpa struktur organisasi formal, di mana pemilik usaha berperan ganda sebagai manajer dan pelaksana operasional. Struktur organisasi yang sederhana biasanya terdiri atas pemilik usaha, bagian pengolahan, pramusaji, dan kasir, dengan pembagian tugas yang fleksibel sesuai kebutuhan harian. Meskipun sistem ini efisien dalam skala kecil, namun keterbatasan fungsi manajerial dan pencatatan keuangan yang belum terstruktur menjadi tantangan dalam pengembangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas manajemen dan literasi akuntansi agar UMKM dapat berkembang lebih profesional dan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM di lima kecamatan di Kota Malang, yaitu Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Sukun, dan Kedungkandang, menunjukkan bahwa seluruh responden belum menerapkan pencatatan maupun penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Tidak ditemukan adanya laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ataupun catatan atas laporan keuangan. Para pelaku usaha umumnya tidak memiliki pembukuan, jurnal transaksi, atau dokumen pencatatan tertulis, sehingga informasi keuangan hanya diperoleh melalui wawancara berdasarkan ingatan mereka. Data keuangan yang disampaikan berupa perkiraan pendapatan dan pengeluaran tanpa didukung bukti pencatatan manual atau digital. Kondisi ini menggambarkan bahwa praktik akuntansi dan pelaporan keuangan belum diterapkan sama sekali oleh UMKM yang diteliti. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan dalam penelitian ini dilakukan secara rekonstruktif menggunakan pendekatan estimasi, di mana beban bahan baku ditetapkan sekitar 60% dari total pendapatan dan penyusutan peralatan dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan umur manfaat

lima tahun. Pendekatan ini memberikan gambaran realistis tentang kondisi keuangan UMKM kuliner di Kota Malang yang masih dikelola secara sederhana dan nonformal.

Kesesuaian Laporan Keuangan yang dibuat UMKM dengan SAK EMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh UMKM di lima kecamatan Kota Malang belum menyusun laporan keuangan secara formal sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Berdasarkan wawancara, para pelaku usaha hanya mengandalkan ingatan dalam mencatat pendapatan dan pengeluaran tanpa adanya dokumentasi tertulis atau klasifikasi akun akuntansi. Beberapa responden, seperti Ibu Sumarni dari Lowokwaru dan Ibu Rohana dari Klojen, mengaku hanya mengingat total pendapatan dan belanja harian tanpa pencatatan rinci. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rozianto dari Blimbing dan Ibu Silfia Maharani yang menyatakan bahwa seluruh transaksi hanya diingat di kepala tanpa buku catatan atau sistem pencatatan kas. Temuan ini memperlihatkan bahwa laporan keuangan UMKM di lapangan sepenuhnya belum memenuhi ketentuan SAK EMKM karena tidak adanya laporan laba rugi, neraca, atau catatan atas laporan keuangan. Akibatnya, seluruh data keuangan yang digunakan bersifat estimatif dan tidak dapat menggambarkan kondisi keuangan sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan formal masih sangat rendah, sehingga diperlukan pendampingan dan rekonstruksi laporan agar sesuai standar akuntansi.

Kendala Penyusun Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di lima kecamatan Kota Malang, ditemukan beberapa kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala pertama adalah keterbatasan pemahaman akuntansi, karena sebagian besar responden hanya berpendidikan hingga SMA bahkan ada yang tamat SD, sehingga tidak memahami cara mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu membuat pemilik usaha harus menangani seluruh kegiatan operasional tanpa tenaga khusus untuk pembukuan. Ketiga, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya laporan keuangan menyebabkan pelaku usaha tidak memandang pencatatan sebagai hal yang prioritas, selama usaha tetap berjalan dan memperoleh keuntungan. Keempat, keterbatasan tersebut juga berdampak pada aspek administratif seperti pelaporan pajak yang seringkali dilakukan berdasarkan perkiraan omzet tanpa laporan keuangan yang terukur. Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Secara keseluruhan, kendala ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan UMKM masih menghadapi hambatan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, sarana, dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya akuntansi.

DISKUSI

Analisis Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh UMKM di lima kecamatan Kota Malang belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara formal dan sistematis sesuai SAK EMKM. Para pelaku usaha hanya mengandalkan ingatan dalam mencatat arus kas tanpa adanya bukti tertulis, pengelompokan transaksi, atau penyusunan neraca saldo yang memadai. Akibatnya, proses perhitungan laba rugi dan posisi keuangan tidak dapat dilakukan secara akurat karena tidak ada pencatatan transaksi yang terstruktur. Peneliti kemudian melakukan rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan informasi hasil wawancara untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan SAK EMKM. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan besar antara praktik aktual UMKM dengan prinsip akuntansi sederhana, terutama dalam hal pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan penyajian laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan penerapan akuntansi menyebabkan UMKM sulit menilai kinerja keuangan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan

pelatihan agar pelaku usaha mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 1. Rekapitulasi Pendapatan dan Biaya Responden

Kecamatan	Pendapatan (Hari operasi x Pendapatan harian)	Pembelian (60% dari Pendapatan)	Gaji Karyawan (Jumlah karyawan x Gaji bulanan)
Lowokwaru	30 hari x Rp 8.000.000 = Rp 240.000.000	60% x Rp 240.000.000 = Rp 144.000.000	6 x Rp 3.200.000 = Rp 19.200.000
Klojen	26 hari x Rp 2.000.000 = Rp 52.000.000	60% x Rp 52.000.000 = Rp 31.200.000	3 x Rp 1.000.000 = Rp 3.000.000
Belimbing	30 hari x Rp 4.000.000 = Rp 120.000.000	60% x Rp 120.000.000 = Rp 72.000.000	3 x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000
Kedungkandang	30 hari x Rp 6.000.000 = Rp 180.000.000	60% x Rp 180.000.000 = Rp 108.000.000	2 x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000
Sukun	26 hari x Rp 5.000.000 = Rp 130.000.000	60% x Rp 130.000.000 = Rp 78.000.000	5 x Rp 1.560.000 = Rp 7.800.000

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2025

Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Yang Dibuat UMKM Dengan SAK EMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh UMKM di lima kecamatan Kota Malang belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara formal dan sistematis sesuai SAK EMKM. Para pelaku usaha hanya mengandalkan ingatan dalam mencatat arus kas tanpa adanya bukti tertulis, pengelompokan transaksi, atau penyusunan neraca saldo yang memadai. Akibatnya, proses perhitungan laba rugi dan posisi keuangan tidak dapat dilakukan secara akurat karena tidak ada pencatatan transaksi yang terstruktur. Peneliti kemudian melakukan rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan informasi hasil wawancara untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan SAK EMKM. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan besar antara praktik aktual UMKM dengan prinsip akuntansi sederhana, terutama dalam hal pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan penyajian laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan penerapan akuntansi menyebabkan UMKM sulit menilai kinerja keuangan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pelatihan agar pelaku usaha mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

a) Kecamatan Lowokwaru

Responden 1 Kecamatan Lowokwaru merupakan pemilik usaha warung makan prasmanan yang dikenal dengan nama *Warung Bu Marni*. Usaha ini dikelola oleh Ibu Sumarni yang berusia 68 tahun dan telah menjalankan usaha sejak tahun 2005. Warung makan tersebut beroperasi selama 24 jam tanpa hari libur, termasuk pada hari libur nasional, dengan sistem kerja karyawan secara bergantian (*shift*). Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional usaha ini sebanyak lima orang karyawan.

UMKM R1		
LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE NOVEMBER 2025		
Pendapatan		Rp 240.000.000,00
Pembelian		<u>Rp 144.000.000,00</u>
Laba Kotor		Rp 96.000.000,00
Beban Usaha:		
Gaji karyawan	Rp 19.200.000,00	
Gas elpiji	Rp 3.240.000,00	
Kebersihan	Rp 500.000,00	
Plastik & perlengkapan	Rp 700.000,00	
Air listrik & wifi	Rp 1.000.000,00	
Tisu	Rp 500.000,00	
Spiritus 1 Jerigen	Rp 275.000,00	
Penyusutan peralatan usaha	Rp 1.291.666,67	
Penyusutan kendaraan bermotor	Rp 300.000,00	
Total Beban Usaha		<u>Rp 27.006.666,67</u>
Laba Bersih		Rp 68.993.333,33

b) Kecamatan Klojen

Responden 2 merupakan pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Klojen yang menjalankan usaha warung makan prasmanan dikenal dengan nama warung Bunga. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Rochana Atmawati, berusia 55 tahun, dan telah beroperasi selama kurang lebih sepuluh tahun. Lama usaha yang relatif stabil menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah memiliki pola operasional yang terbentuk dalam melayani konsumen. Selain melayani penjualan harian di warung, Responden 3 juga secara rutin menerima pesanan nasi kotak dalam jumlah tetap setiap hari Jumat. Aktivitas ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga berkontribusi terhadap total pendapatan usaha dalam satu periode pelaporan.

UMKM R2		
LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE NOVEMBER 2025		
Pendapatan:		
Pendapatan harian		Rp 52.000.000,00
Pendapatan mingguan		Rp 4.800.000,00
Pembelian		<u>Rp 31.200.000,00</u>
Laba Kotor		Rp 25.600.000,00
Beban Usaha:		
Gaji karyawan	Rp 3.000.000,00	
Gas elpiji	Rp 1.080.000,00	

Kebersihan	Rp 100.000,00	
Plastik & perlengkapan	Rp 250.000,00	
Air listrik & wifi	Rp 350.000,00	
Tisu	Rp 200.000,00	
Penyusutan peralatan usaha	Rp 555.000,00	
Penyusutan kendaraan bermotor	Rp 200.000,00	
Total Beban Usaha		Rp 5.535.000,00
Laba Bersih		Rp 20.065.000,00

c) Kecamatan Belimbing

Usaha Warung Cak Rossi yang dikelola oleh Bapak Rozianto yang berusia 38 tahun di Kecamatan Blimbing merupakan salah satu UMKM kuliner yang telah beroperasi dalam jangka waktu panjang, yaitu sejak tahun 1996. Meskipun telah berdiri hampir tiga dekade, skala operasional usaha ini tetap dijalankan secara sederhana dengan melibatkan dua orang pelaku utama, yaitu Bapak Rozianto dan istrinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha tidak selalu ditentukan oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja, melainkan oleh konsistensi pengelolaan dan kemampuan mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Keikutsertaan pasangan suami istri sebagai pelaku utama usaha mencerminkan pola pengelolaan berbasis keluarga, di mana pemilik usaha berperan langsung dalam seluruh aktivitas operasional, mulai dari produksi hingga pelayanan kepada pelanggan. Dengan struktur seperti ini, pemisahan antara aktivitas usaha dan rumah tangga cenderung bersifat fleksibel, namun tetap memungkinkan usaha untuk berjalan secara stabil karena pengambilan keputusan dilakukan secara langsung oleh pemilik tanpa perantara.

UMKM R3		
LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE NOVEMBER 2025		
Pendapatan		Rp 120.000.000,00
Pembelian		Rp 72.000.000,00
Laba Kotor		Rp 48.000.000,00
Beban Usaha:		
Gaji karyawan	Rp 6.000.000,00	
Gas elpiji	Rp 1.620.000,00	
Kebersihan	Rp 200.000,00	
Plastik & perlengkapan	Rp 250.000,00	
Listrik & wifi	Rp 500.000,00	
Tisu	Rp 200.000,00	
Penyusutan peralatan usaha	Rp 615.833,33	
Penyusutan kendaraan bermotor	Rp 333.333,33	
Total Beban Usaha		Rp 9.385.833,33
Laba Bersih		Rp 38.614.166,67

d) Kecamatan Kedungkandang

Usaha Warung Pak Agus yang dikelola oleh Bapak Agus Siswajaya berusia 43 tahun di Kecamatan Kedungkandang merupakan usaha kuliner yang relatif masih muda, dengan lama usaha tiga tahun. Usaha ini dijalankan bersama oleh Bapak Agus dan istrinya, tanpa melibatkan tenaga kerja dari luar keluarga. Kegiatan operasional berlangsung setiap hari dari Senin hingga Minggu, menunjukkan tingkat intensitas usaha yang cukup tinggi meskipun skala usaha masih terbatas. Sebagai usaha yang masih berada pada tahap awal perkembangan, pengelolaan Warung Pak Agus lebih berorientasi pada keberlangsungan operasional harian dibandingkan dengan pengelolaan administrasi keuangan. Seluruh aktivitas produksi, pelayanan, hingga pengelolaan kas dilakukan langsung oleh pemilik dan istri, tanpa adanya pembagian fungsi yang jelas antara pengelola operasional dan pengelola keuangan.

UMKM R4		
LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE NOVEMBER 2025		
Pendapatan		Rp 180.000.000,00
Pembelian		<u>Rp 108.000.000,00</u>
Laba Kotor		Rp 72.000.000,00
Beban Usaha:		
Gaji karyawan	Rp 6.000.000,00	
Gas elpiji	Rp 1.620.000,00	
Kebersihan	Rp 200.000,00	
Plastik & perlengkapan	Rp 250.000,00	
Listrik & wifi	Rp 400.000,00	
Tisu	Rp 300.000,00	
Penyusutan Peralatan Usaha	Rp 790.000,00	
Penyusutan Kendaraan Bermotor	Rp 250.000,00	
Total Beban Usaha		<u>Rp 9.560.000,00</u>
Laba Bersih		Rp 62.440.000,00

e. Kecamatan Sukun

Warung Arema yang dikelola oleh Ibu Sulikayang berusia 38 tahun di Kecamatan Sukun dijalankan dengan melibatkan empat orang karyawan tanpa penerapan sistem shift. Seluruh karyawan bekerja secara bersamaan mulai pukul 06.00 WIB hingga 15.00 WIB. Pola kerja ini mencerminkan usaha dengan jam operasional terpusat pada waktu pagi hingga siang hari, dengan aktivitas usaha yang padat dalam rentang waktu tertentu.

UMKM R5		
LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE NOVEMBER 2025		
Pendapatan		Rp 130.000.000,00
Pembelian		<u>Rp 78.000.000,00</u>
Laba Kotor		Rp 52.000.000,00

Beban Usaha:		
Gaji karyawan	Rp 7.800.000,00	
Gas elpiji	Rp 1.620.000,00	
Kebersihan	Rp 250.000,00	
Plastik & perlengkapan	Rp 700.000,00	
Air listrik & wifi	Rp 750.000,00	
Tisu	Rp 500.000,00	
Air Galon	Rp 1.440.000,00	
Penyusutan peralatan usaha	Rp 829.166,67	
Penyusutan kendaraan bermotor	Rp 266.666,67	
Total Beban Usaha		<u>Rp 13.889.166,67</u>
Laba Bersih		Rp 38.110.833,33

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh UMKM di lima kecamatan Kota Malang belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara formal dan sistematis sesuai SAK EMKM. Para pelaku usaha hanya mengandalkan ingatan dalam mencatat arus kas tanpa adanya bukti tertulis, pengelompokan transaksi, atau penyusunan neraca saldo yang memadai. Akibatnya, proses perhitungan laba rugi dan posisi keuangan tidak dapat dilakukan secara akurat karena tidak ada pencatatan transaksi yang terstruktur. Peneliti kemudian melakukan rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan informasi hasil wawancara untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan SAK EMKM. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan besar antara praktik aktual UMKM dengan prinsip akuntansi sederhana, terutama dalam hal pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan penyajian laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan penerapan akuntansi menyebabkan UMKM sulit menilai kinerja keuangan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pelatihan agar pelaku usaha mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Analisis Kendala Penyusunan Laporan Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh UMKM di lima kecamatan Kota Malang belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM karena rendahnya literasi keuangan dan pemahaman akuntansi. Sebagian besar pelaku usaha hanya berpendidikan SMA atau lebih rendah, sehingga pencatatan transaksi dilakukan secara sederhana dan tidak terstruktur. Selain itu, persepsi bahwa laporan keuangan tidak penting membuat pelaku UMKM lebih fokus pada kegiatan operasional harian dibandingkan pencatatan formal. Akibatnya, pelaporan keuangan dan perpajakan dilakukan berdasarkan perkiraan, bukan data akuntansi yang akurat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak dan lemahnya kemampuan evaluasi usaha. Solusi yang disarankan meliputi pelatihan akuntansi dasar, pendampingan berkelanjutan, serta sosialisasi manfaat laporan keuangan bagi pengelolaan dan kepatuhan perpajakan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh UMKM di lima kecamatan Kota Malang belum menyusun laporan keuangan secara formal sesuai SAK EMKM, karena pencatatan keuangan masih dilakukan berdasarkan ingatan tanpa dokumentasi tertulis. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan tidak tersedia, sehingga pelaku usaha tidak memiliki dasar untuk menilai kinerja dan posisi keuangan usahanya. Rekonstruksi laporan yang dilakukan peneliti

menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana jika pelaku UMKM memiliki pemahaman dan sistem pencatatan yang baik. Kendala utama berasal dari rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku UMKM mulai menerapkan pencatatan sederhana sesuai SAK EMKM, pemerintah daerah memperluas program pelatihan dan pendampingan akuntansi, serta akademisi berperan dalam penelitian dan pengembangan modul praktis agar penerapan SAK EMKM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Pertama, keterbatasan utama terletak pada sumber data yang sebagian besar diperoleh melalui wawancara, karena seluruh pelaku UMKM tidak memiliki catatan keuangan tertulis. Hal ini menyebabkan proses rekonstruksi laporan keuangan yang dilakukan peneliti sangat bergantung pada ingatan dan estimasi responden, sehingga tingkat keakuratannya terbatas. Kedua, jumlah responden yang relatif sedikit dan hanya mencakup lima kecamatan di Kota Malang membatasi generalisasi temuan terhadap seluruh populasi UMKM di wilayah lain. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tanpa analisis kuantitatif, sehingga hasilnya lebih bersifat eksploratif dan belum mampu menggambarkan hubungan kausal antarvariabel. Keempat, keterbatasan waktu penelitian juga membatasi kedalaman analisis terhadap dinamika keuangan UMKM dari periode ke periode. Selain itu, kurangnya data pendukung seperti bukti transaksi dan laporan pajak menyebabkan analisis kesesuaian terhadap SAK EMKM tidak dapat diverifikasi secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian ini harus dipahami sebagai gambaran umum mengenai kondisi aktual di lapangan, bukan representasi mutlak dari seluruh UMKM di Kota Malang. Peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah responden, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiya, N., & Susilo, H. (2025). *Penerapan SAK EMKM dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Jombang*. Jurnal Akuntansi UMKM, 10(1), 55–68.
- Andayani, D., Kusuma, H., & Putra, R. (2024). *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM dengan Pendekatan SAK EMKM*. Jurnal Akuntansi Terapan, 8(3), 211–223.
- Anggraeni, R., Marlina, T., & Suwarno, A. (2023). *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM: Studi Kasus Pabrik Tempe Pak Kasmono*. Jurnal Akuntansi Mikro, 9(2), 45–57.
- Dewi, S., & Mekar Sari, P. (2024). *Pemahaman SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Akuntansi Riset Daerah, 5(1), 22–34.
- Guindrayanti, R. (2024). *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM Berbasis Aplikasi SI APIK (Toko Gifa Collection, Bondowoso)*. Jurnal Ekonomi Digital, 4(1), 15–27.
- Hapsari, D., & Handayani, T. (2020). *Permasalahan Pencampuran Keuangan Usaha dan Pribadi pada UMKM*. Jurnal Ekonomi Mikro, 8(2), 33–44.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: IAI.
- Kalsum, N., Ikhtiari, R., & Dwiyantri, E. (2022). *Penerapan SAK EMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan UMKM di Food City Pasar Segar Kota Makassar*. Jurnal Akuntansi Syariah, 6(1), 45–56.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). *Statistik UMKM Nasional 2025*. Jakarta: Kemenkop UKM.

-
- Lestari, A., Puspitasari, R., & Abubakar, D. (2022). *Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM pada UMKM Teguh Karya Bakery di Kota Pontianak*. Jurnal Riset Ekonomi, 7(1), 14–25.
- Oktavia, S., Mahdalena, I., & Taruh, Y. (2024). *Kendala SDM dalam Penerapan SAK EMKM pada UMKM Rumah Karawo Gorontalo*. Jurnal Akuntansi Daerah, 6(2), 45–57.
- Rayyani, L., et al. (2025). *Pentingnya Pembuatan Laporan Keuangan bagi UMKM*. Jurnal Akuntansi UMKM, 12(1), 23–34.
- Rustiana, D., Budisantoso, H., & Kurniawan, T. (2024). *Pelatihan Literasi Akuntansi untuk UMKM*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(2), 145–156.
- Sri Ayem, A., et al. (2024). *Review Literatur: Faktor Keberhasilan Implementasi SAK EMKM*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 15(1), 11–25.
- Susilowati, D. (2021). *Kendala Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Indonesia*. Jurnal Ilmu Akuntansi, 7(1), 45–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93*.
- Wahyuni, E., Probowulan, A., & Murwanti, H. (2024). *Eksistensi Pencatatan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM dengan Aplikasi Excel (CV. Teras Jaya)*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 8(1), 55–68.